IDN/ANTARA

SERAH TERIMA JABATAN DANLANTAMAL V

Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan (tengah) melakukan salam komando bersama Kolonel Marinir Joni Sulistiawan (kiri) dan Laksamana Pertama TNI Eko Wahjono (kanan) saat Serah Terima Jabatan Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V di Lantamal V, Surabaya, Jawa Timur, Senin (23/10). Kolonel Marinir Joni Sulistiawan resmi menjabat Danlantamal V menggantikan Laksamana Pertama TNI Eko Wahjono yang menempati jabatan Wakil Komandan (Wadan) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal).

MKMK Segera Dibentuk untuk Memeriksa Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Dkk

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang banyak dilaporkan masyarakat.

Adapun tokoh yang akan masuk sebagai anggota MKMK di antaranya, Jimly Asshiddiqie, Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adams.

MKMK itu dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang usia di bawah 40 tahun bisa menjadi capres/cawapres sepanjang sedang/pernah menjadi kepala daerah.

"Kami telah melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk menyegerakan membentuk Majelis MKMK," ujar hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih dalam konferensi pers di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Enny mengatakan ada tiga orang yang telah diputuskan menjadi anggota MKMK. Mereka terdiri dari tokoh masyarakat hingga hakim aktif MK.

"Kami dalam RPH, telah menyepakati bahwa yang akan menjadi bagian dari MKMK ini adalah Profesor Jimly. Kemudian kedua adalah Prof Bintan Saragih. Ketiga Yang Mulia doktor Wahiduddin Adams," paparnya.

Enny mengatakan pembentukan itu bakal dilakukan dalam waktu dekat. Dia mengatakan nantinya MKMK akan bertugas memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

"Dalam waktu dekat ini akan segera dibentuk, untuk segera bekerja, untuk kemudian melakukan proses sebagaimana hukum acara yang berlaku di dalam MKMK untuk menangani paling tidak 7 yang sudah masuk di sini," ujar Enny.

Enny mengatakan, jika saat ini ada tujuh perkara yang telah masuk usai adanya putusan terkait batas usia capres-cawapres. Dia mengatakan laporan-laporan itu terdiri dari berbagai macam aduan.

"Yang sudah masuk berkaitan laporan saya tidak sebutkan nama-namanya, artinya dari berbagai macam kalangan, kelompok masyarakat di sini termasuk juga ada yang dari tim advokasi yang mungkin mereka konsen terhadap persoalan pemilu, perihal yang mereka ajukan ialah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim," tuturnya.

Sejumlah orang telah melaporkan dugaan pelanggaran etik hakim MK. Di antaranya yang dilakukan oleh Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Laporan ini masih terkait degan putusan usia capres-cawapres yang diketok MK pada Senin (16/10) kemarin.

Menyusul Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) juga melaporkan lima dari sembilan hakim MK kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi, Kamis (19/10/2023). Pelaporan kelima hakim MK ini terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim pada putusan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Lima hakim yang dilaporkan PBHI ke Dewan Etik Hakim Konstitusi yakni Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.

Di sisi lain, muncul laporan juga terhadap hakim MK Saldi Isra yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) dan Komunitas Advokat Lingkar Nusantara (Lisan). ● **han**

Anugerah Pajak Daerah Kabupaten Bogor 2023 dan *Launching* LAPORPAK

BOGOR (IM) - Tantangan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Daerah tentu tidaklah mudah.

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah ini dibutuhkan peran serta aktif dan dukungan dari masyarakat maupun para stakeholder lainnya. Dengan optimalnya pengelolaan pendapatan daerah, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Bogor.

Salah satu sektor penerimaan yang memberikan kontribusi besar pada Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pajak Daerah merupakan kontributor terbesar dalam struktur komposisi penerimaan PAD.

Per tanggal 16 Oktober 2023, realisasi Pajak Daerah telah mencapai angka 33,39% terhadap realisasi Pendapatan Daerah dan 72,13% terhadap capaian realisasi PAD.

Untuk itu, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan memberikan motivasi terutama kepada para wajib pajak maupun pihak-pihak lainnya yang turut serta dalam proses pencapaian peningkatan penerimaan pajak daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya terhadap pencapaian target penerimaan Pajak Daerah. Bentuk apresiasi ini diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dalam kegiatan/acara Anugerah Pajak Daerah Kabupaten Bogor.

Anugerah Pajak Daerah diselenggarakan setiap tahun untuk memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak, Kepala Desa/Lurah, PPAT/PPATS, Camat, Instansi vertikal/Lembaga/Organisasi atau pihak lain yang membantu pemungutan pajak untuk terus berperan aktif dalam upaya pemungutan pajak daerah.

Anugerah Pajak Daerah tahun 2023 dilaksanakan pada Kamis 19 Oktober 2023 bertempat di Pullman Ciawi Vimala Hill Resort Spa & Convention, Puncak.

Dihadiri kurang lebih 700 Orang undangan yang terdiri dari Unsur Forkopimda Kabupaten Bogor, Instansi/Lembaga/Organisasi baik dari Provinsi Jawa Barat maupun yang berada di Wilayah Kabupaten Bogor, Perangkat Daerah, PPAT/PPATS, Camat, Kepala Desa/Lurah, Wajib Pajak, Serta Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana di Lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Acara dibuka dengan Laporan dari Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dan Sambutan dari Bupati Bogor, kemudian penghargaan diberikan oleh Bupati Bogor H. Iwan Setiawan kepada pihak-pihak yang telah mendukung Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah, yang terdiri dari:

1. Wajib Pajak terbaik yang telah membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah berdasarkan 10 kategori jenis pajak yang dikelola oleh Bappenda Kabupaten Bogor, sebanyak 31 Wajib Pajak, yaitu :

- Kategori Pajak Hotel diberikan kepada The Botanica Sanctuary, The Highland Park Resort/Karunia Sejahtera Indah, dan Harris, Hotel/PT Global Solusi Nusantara ;
- Kategori Pajak Restoran diberikan kepada : PT Rekso Nasional Food MC Donald Cibinong, Cimory Resto/PT Cimory Hospitally Sejahtera dan RM Kedai Kita ;
- Kategori Pajak Hiburan diberikan kepada : Taman Safari Indonesia, PT Wisata Sapta pesona dan PT Nusantara Sejahtera Raya/Cinema XXI
- Kategori Pajak Reklame diberikan kepada : PT Graha Surya Media, PT Media Indra Buana dan PT AEON Mall Indonesia ;
- Kategori Pajak Penerangan Jalan diberikan kepada: PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat UP3 Bogor, PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat UP3 Gunung Putri, PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat UP3 Depok dan PT. PLN UID Jakarta Raya
- Kategori Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diberikan kepada : PT Indocement Tunggal Prakarsa Indonesia, Tbk, PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan PT Meganta Batu Sampurna ;
- Kategori Pajak Parkir diberikan kepada : PT. Centrepark Citra Corpora, PT Wisata Sapta Pesona dan PT Anugerah Bina Karya/Sentra Eropa ;
- Kategori Pajak Bumi dan Bangunan P2 diberikan kepada : PT Jasa marga (Persero), PT Aeon Mall Indonesia dan PT Trans Jabar Toll ;
- Kategori Pajak BPHTB diberikan kepada : PT Tiga Dua Delapan, PT Telkom Data Ekosistem dan Ulyan Nicolay.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memberikan kontribusi terbaik terhadap Penerimaan BPHTB dan melaksanakan pelaporan bulanan pembuatan akta tepat waktu, sebanyak 3 PPAT, yaitu: Ilyas, SH, Sardi, SH, M.Kn dan Nugroho Trijatmiko, S.H., M.Hum., M.Kn

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang memberikan kontribusi terbaik terhadap penerimaan BPHTB dan melaksanakan pelaporan bulanan pembuatan akta tepat waktu, sebanyak 3 PPATS, yaitu: Camat Caringin, Camat Gunung Putri dan Camat Jonggol.

4. Kecamatan terbaik dengan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terbesar, sebanyak 3 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Gunung Putri dan Kecamatan Cileungsi.

5. Kecamatan terbaik dengan Pencapaian Target Pajak Daerah tertinggi sebanyak 3 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Nanggung, Kecamatan Klapanunggal dan Kecamatan Leuwisadeng.

6. Desa/kelurahan yang telah mendukung Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bogor serta telah melunasi PBB-P2 Buku 1 atau Buku 1 dan Buku 2 Tahun Pajak 2023, sebanyak 48 Desa dan 1 Kelurahan, yaitu Kelurahan Atang Sanjaya Kecamatan Kemang dan desa-desa sebagai berikut :

- Kecamatan Ciampea : Desa Bojong Jengkol
- Kecamatan Sukajaya : Desa Cisarua, Desa Kiara Sari, Desa Kiarapandak, Desa Harkat Jaya, Desa Sukajaya, Desa Sipayung, Desa Sukamulih, Desa Cileuksa, Desa Pasir Madang, Desa Jaya Raharja, Desa Urug
- Kecamatan Tenjo : Desa Babakan
- Kecamatan Jasinga : Desa Jugalajaya, Desa Neglasari, Desa Sipak
- Kecamatan Cigudeg : Desa Bunar, Desa Sukamaju, Desa Tegal Lega, Desa Banyuwangi, Desa Sukaraksa
- Kecamatan Parung Panjang : Desa Dago
- Kecamatan Cibungbulang : Desa Cemplang, Desa Dukuh, Desa Galuga, Desa Girimulya, Desa Situ Udik
- Kecamatan Leuwisadeng : Desa Kalong I, Desa Kalong II, Desa Sadeng
- Kecamatan Nanggung : Desa Cisarua, Desa Kalong Liud, Desa Sukaluyu
- Kecamatan Pamijahan : Desa Ciasihan, Desa Ciasmara, Desa Cibitung Kulon, Desa Cibitung Wetan, Desa Cibunian, Desa Pasarean
- Kecamatan Megamendung : Desa Sukamahi, Desa Cipayung, Desa Gadog
- Kecamatan Cisarua : Desa Leuwiliang
- Kecamatan Cigombong : Desa Srogol, Desa Wates Jaya
- Kecamatan Cariu : Desa Sukajadi
- Kecamatan Tanjung Sari : Desa Buanajaya
- Kecamatan Citeureup : Desa Sanja

7. Instansi/Lembaga/Organisasi/pihak lain yang telah mendukung Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, sebanyak 10 Instansi/Lembaga/Organisasi/pihak lain, yaitu: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kabupaten Bogor, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bogor Dewi Sartika, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Pengurus Daerah Kabupaten Bogor Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pengurus Daerah Kabupaten Bogor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Seiring dengan upaya untuk memotivasi wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, Bappenda pun terus melakukan upaya lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bogor. Pengembangan inovasi-inovasi yang sudah diimplementasikan ataupun menciptakan inovasi baru merupakan salah satu strategi yang dilakukan Bappenda sepanjang tahun 2023 ini.

Bersamaan dengan acara Anugerah Pajak Daerah Kabupaten Bogor tahun 2023, Bappenda melaksanakan launching Aplikasi "LAPOR PAK" yang merupakan inovasi baru yang digagas oleh Arif Rahman, S.H, M.H selaku Kepala Bappenda Kabupaten Bogor.

"LAPOR PAK" kepanjangan dari Laporan Potensi Retribusi dan Pajak yang merupakan Pelaporan Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Wilayah Desa dan Kelurahan.

Aplikasi "LAPOR PAK" dapat diakses menggunakan browser melalui komputer atau smartphone dengan akses internet. Penggunaan aplikasi LAPOR PAK ini dapat mendorong desa/kelurahan untuk berperan aktif melaporkan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayahnya masing-masing, agar potensi pajak daerah dan retribusi daerah dapat terpetakan secara cepat, jelas, detail, dan real time sehingga dapat meningkatkan penerimaan bagi hasil desa yang berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada acara launching Aplikasi "LAPOR PAK" ini pun secara simbolis dipakaikan rompi LAPOR PAK, yang dibagikan kepada seluruh Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Bogor, dan akan diberikan pula kepada para operator Aplikasi "LAPOR PAK".

Penggunaan rompi LAPOR PAK ini sebagai salah satu dukungan dari semua pihak yang akan mensukseskan implementasi Aplikasi "LAPOR PAK".

Sebelum kegiatan launching dilaksanakan, Bappenda telah melaksanakan serangkaian kegiatan terkait Aplikasi "LAPOR PAK" antara lain : Sosialisasi Internal Bappenda yang dilaksanakan pada 25 September 2023, Sosialisasi kepada para Pemerintah Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan pada 3 Oktober 2023 yang dilaksanakan di Gedung Tegar Beriman, serta mengadakan Pelatihan melalui Bimbingan Teknis bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk Tata Cara Penggunaan Aplikasi dan Pengisian Aplikasi "LAPOR PAK" pada 4 – 5 Oktober 2023 yang dilaksanakan di Auditorium Bappenda. Dan sampai saat ini sebanyak ±300 laporan yang telah diterima kaitan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dilaporkan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Berdasarkan laporan ini, Bappenda akan segera melakukan verifikasi dan penanganan tindak lanjut sesuai dengan SOP yang berlaku.

Untuk itu, apresiasi yang besar disampaikan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan yang telah mendukung penerapan Aplikasi "LAPOR PAK". Dengan Aplikasi "LAPOR PAK" ini, akan membangkitkan kembali semangat kerja dan peningkatan kinerja dalam Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah. ● **ADV**

"Mari Laporkan Potensinya, Tingkatkan Bagi Hasilnya"